

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Batu Bara, Marwan, 2021, *Buku Putih Geo Dipa Energi*, PT. Geo Dipa Energi (Persero), Jakarta.
- Elmi, Ibnu & Tarantang, Jefry, 2019, *Arbitrase (Paradigma Teroritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di Indonesia)*, K-Media, Yogyakarta.
- Feri Setiawan Saman, 2011, *Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memanfaatkan Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase, Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2006, *Arbitrase*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Kadir, Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lotulung, Paulus E, 2011, *Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Rapat Kerja Nasional yang berjudul "Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan"* disampaikan tanggal 10 – 14 Oktober 2011, Balikpapan.
- Mariyadi dan Afandi, 2008, *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)*, Visipress Media, Surabaya.
- Mariyadi dan Afandi, 2008, *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)*, Visipress Media, Surabaya.
- Moleong, Lexi J, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Urip Winata, 1983, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Salim, 2019, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Bandung.

- Soeroso, R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2021, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Triana, Nita, 2019, *Alternative Dispute Resolution*, Kaizen Sarana Edukasi.
- Yuhelson, 2018, *Hukum Arbitrase*, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Zulkarnaen, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, Pustaka Setia, Bandung.

Artikel Jurnal

- Andriani, Agustini, Akibat Hukum Pembatalan Putusan arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Bianti, Gianti, Pelaksanaan Eksekusi Putusan arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia, *Jurnal Crepido*, Vol. 5, No. 01, Juli 2023.
- Jayadi, Hendri, Legal Certainty Implementation of Arbitration Decisions in Indonesia, *Atlantis Press SARL*, Vol. 472, 2020.
- Jessicha Tengar Pamolango, “Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa, *Lex Administratum*, Vol. 3 No.1, 2015.
- Mardiyati, Siti dan Aprita, Serlika, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Arbitrase Bagi Pelaku Usaha”, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 3, Agustus 2022.
- Padin, Andini; Khafifatunnisa, Sa’adiyah; Ruth, Generista Ester; Pradana, M.; Arfifi, Randi; & A, Diaz Kartika, Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional melalui Metode Arbitrase, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.3, 2023.
- Raymond, Hizkia, “Problematika Final dan Mengikat Putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021.
- Satrio, Dwi Bintang dan Fakhriah, Efa Laela, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang membatalkan Putusan arbitrase Nasional dihubungkan dengan Prinsip Acces to Justice”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, Maret 2018.
- Situmorang, Mosgan, “Pembatalan Putusan arbitrase (Annulment of Arbitration Awards)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 20, No. 4, Desember 2020.

Sugiyono, Heru; Suyanto, Heru; dan Agustanti, Rosalia Dika “Legal Certainty in Arbitration Award That are Final and Binding”, *Indonesia Law Review*, Vol. 10, No. 3, 31 Desember 2020.

Watti, Paula Karlina, Taroreh, Royke A, dan Mamangkey, Rudy M.K., “Peranan Pengadilan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa melalui Proses Arbitrase”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XI, No. 3, Maret 2023.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Budi Widarto, 2017, *Penyelesaian Sengketa di Peradilan Umum terhadap Perjanjian yang Mengandung Klausula Arbitrase (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 238 PK/PDT/2014 tertanggal 29 Oktober 2014 antara PT Berkah Karya Bersama sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana dan Kawan-kawan sebagai Termohon Peninjauan Kembali)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Surya Kurniawan, 2019, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan arbitrase Di Luar Alasan Pembatalan Putusan arbitrase Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 42 PK/PDT.Sus-Arbt/2017)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet

Indrawan, Rio, “Pengembangan Panas Bumi Dieng dan Patuha Berpotensi Mangkrak, Akibat Intervensi Oknum Pimpinan KPK?”, <https://www.dunia-energi.com/pengembangan-panas-bumi-dieng-dan-patuha-berpotensi-mangkrak-akibat-intervensi-oknum-pimpinan-kpk/>, diakses 4 September 2023.

Karel Martel, “Sidang Sengketa Informasi PT. Bumigas vs KPK RI”, <https://komisiinformasi.go.id/read/12/09/2023/Sidang-Sengketa-Informasi-PT.-Bumigas-vs-KPK-RI>, diakses 12 September 2023.

Perpustakaan Online Universitas Illinois Chicago, “International Commercial & Investment Arbitration Research: Getting Started”, <https://libraryguides.law.uic.edu/c.php?g=1277317> di akses tanggal 29 Oktober 2023.

Soenarso, Sugeng Adji, “Badan Arbitrase Sengketa Energi Indonesia (BASE) Resmi Didirikan”, https://nasional.kontan.co.id/news/badan-arbitrase-sengketa-energi-indonesia-base-resmi-didirikan#google_vignette, diakses pada 29 Februari 2023.

Yessy, “Konflik Bumigas Vs Geodipa Negara Berpotensi Rugi Rp2,4 Triliun”,
<https://www.jpnn.com/news/konflik-Bumigas-vs-geodipa-negara-berpotensi-rugi-rp-24-t?page=2>, diakses 5 September 2023.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8).

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107).

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 995).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan arbitrase (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 827).

Putusan Pengadilan

Putusan BANI Nomor 271/XI/ARB-BANI/2007

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 267/Pdt.P/2008/PN.JKT/Sel.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 250K/PDT.SUS/2009

Putusan Mahkamah Agung Nomor 16PK/I/PDT.SUS/2010

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

Putusan Mahkamah Agung Kasasi (Banding) Nomor 586K/PDT.SUS/2012

Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 143PK/Pdt.Sus-Arbt/2013

Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali ke 2 (dua) Nomor 45 PK/ Pdt.Sus-Arbt/2015

Putusan BANI Nomor 922/II/ARB-BANI/2017

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
529/Pdt.G.ARB/2018/JKT.SEL

Putusan Mahkamah Agung Kasasi (Banding) Nomor 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019

Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 31PK/Pdt. Sus-Arbt/2020

Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 43PK/Pdt.Sus-Arbt/2020

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 56PK/Pdt.Sus-Arbt/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014

Perjanjian

Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement Nomor
KTR.001/GDE/II/2005